



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3908-3914

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013

Siti Marwiyah^{1✉}, M. Mahdi Hasan²

Universitas Panca Marga

Email: marwiyah@upm.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tantangan signifikan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ruang publik yang aman, teratur, dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 15 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, PKL, dan masyarakat pengguna jasa PKL, yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode tematik melalui proses transkripsi, pengkodean, kategorisasi, dan penyusunan narasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan didukung oleh organisasi pelaksana, masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman PKL tentang regulasi, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi yang lemah. Faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi, memperbaiki fasilitas, dan melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penataan PKL, Peraturan Daerah, Alun-Alun Gresik*

Abstract

The arrangement of Street Vendors (PKL) poses a significant challenge for local governments in creating safe, orderly, and comfortable public spaces. This study aims to assess the implementation of PKL arrangement policies in Alun-Alun Gresik based on Regional Regulation Number 07 of 2013. The method used is a qualitative approach with a case study design, involving 15 informants consisting of government officials, street vendors, and community members who utilize PKL services, selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and documentation, and then analyzed using thematic methods through the processes of transcription, coding, categorization, and narrative construction. The research findings indicate that although the policy implementation is supported by the executing organization, there are still obstacles such as a lack of understanding among PKL regarding regulations, limited resources, and weak inter-agency coordination. Social and economic factors also influence the success of this policy. Therefore, it is recommended that the government enhance socialization efforts, improve facilities, and conduct regular evaluations to align policies with on-the-ground conditions.

Keywords: Policy Implementation, PKL Arrangement, Regional Regulation, Gresik Square

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela, 2008). Di Kabupaten Gresik, sektor perdagangan, khususnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), memegang peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, sektor perdagangan menyumbang 15,3% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2021, memperlihatkan bahwa sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (BPS Gresik, 2021). Namun demikian, kehadiran PKL juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan tata ruang kota, yang berpotensi mengganggu kenyamanan serta estetika lingkungan.

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 untuk mengatur penataan PKL, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, terutama di kawasan Alun-Alun Kabupaten Gresik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas PKL. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan kebijakan terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu studi yang relevan adalah karya Sari dan Prasetyo (2018) berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya." Penelitian tersebut meninjau peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Surabaya dalam melaksanakan kebijakan, dan menemukan bahwa masih banyak pedagang yang berjualan di area terlarang, menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan pedagang serta penegakan regulasi yang lebih tegas.

Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2020) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan PKL. Temuannya menunjukkan bahwa penerapan peraturan belum berjalan maksimal, dengan masih banyak PKL yang beraktivitas di trotoar, yang menandakan bahwa upaya penataan dan relokasi belum efektif. Studi ini menyarankan perlunya langkah tambahan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan regulasi yang mengatur PKL di Kabupaten Gresik. Penelitian terdahulu umumnya terpusat pada area tertentu dan belum secara khusus mengkaji situasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik. Selain itu, minimnya pembaruan regulasi yang berlaku menghambat efektivitas pengawasan serta pemanfaatan fasilitas bagi PKL. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 terkait penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kabupaten Gresik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Gresik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013? Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith (2011) sebagai landasan teoretis. Teori tersebut menyoroti empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: kejelasan kebijakan yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait, ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran, peran organisasi pelaksana dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret, serta pengaruh faktor lingkungan yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memahami hubungan antar keempat variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan PKL di kawasan Alun-Alun Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan rancangan studi kasus guna menelusuri secara mendalam penerapan kebijakan pemerintah terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Gresik, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor

07 Tahun 2013. Sebanyak 15 orang informan dipilih secara selektif sesuai kriteria tertentu, di antaranya adalah pejabat pemerintah daerah yang mengelola PKL, pedagang yang berjualan di Alun-Alun Gresik, serta warga yang memanfaatkan layanan PKL.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* agar peneliti dapat memilih individu yang paling relevan dengan fokus kajian (Sugiyono, 2017). Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (Samsu, 2017). Instrumen ini bertujuan memperoleh informasi mendalam terkait pengalaman, pemahaman, dan pandangan para informan mengenai pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Gresik. Demi memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan serta temuan observasi lapangan (Creswell, 2014). Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta konfirmasi kepada informan terhadap data yang telah dikumpulkan guna menjamin keakuratan informasi (Moleong, 2018).

Proses analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari transkripsi hasil wawancara, dilanjutkan dengan proses pengkodean untuk menemukan tema-tema utama, pengelompokan data ke dalam kategori tematik, hingga penafsiran dan penyusunan hasil analisis dalam bentuk narasi yang utuh dan menyeluruh (Anto *et al.*, 2024).

Temuan penelitian ini disajikan secara deskriptif, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Gresik (Braun & Clarke, 2006). Uraian tersebut tidak hanya membahas proses implementasi kebijakan secara detail, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini memiliki manfaat menilai implementasi kebijakan pemerintah dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh empat variabel utama sebagaimana dikemukakan dalam teori Implementasi Kebijakan oleh Thomas B. Smith (2011), yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Pertama, terkait kebijakan ideal, Perda Nomor 07 Tahun 2013 dirancang untuk menciptakan penataan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan di lapangan masih mengalami banyak

hambatan. Banyak PKL yang tetap beraktivitas di area yang dilarang, seperti Alun-Alun, yang mencerminkan adanya ketimpangan antara konsep kebijakan dan implementasi aktual. Kondisi ini mendukung temuan Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan masih jauh dari harapan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Kedua, dari sisi kelompok sasaran, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar PKL belum memahami secara menyeluruh isi dari Perda Nomor 07 Tahun 2013. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah menyebabkan kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo (2018), yang menekankan pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan pelaku usaha kecil untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiga, mengenai organisasi pelaksana, yakni Dinas Koperasi dan UMKM serta Satpol PP Kabupaten Gresik, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum dilakukan, masih terdapat hambatan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperlemah efektivitas pengawasan. Temuan ini memperkuat teori Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan tingkat komitmen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Keempat, faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi turut memengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tekanan ekonomi memaksa PKL untuk terus berjualan di lokasi terlarang demi memenuhi kebutuhan hidup. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan PKL, yang dinilai menyediakan produk dengan harga terjangkau dan akses mudah, juga turut menyulitkan upaya penegakan peraturan.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi, dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen resmi, serta hasil observasi di lapangan. Observasi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2013 masih terjadi, yang menguatkan temuan lain bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan PKL. Upaya peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi PKL tentang kepatuhan terhadap peraturan, serta penegakan hukum yang konsisten perlu ditingkatkan. Selain itu, dukungan fasilitas memadai untuk PKL agar dapat berdagang di area yang telah ditentukan menjadi faktor penting.

Penelitian ini juga merekomendasikan adanya evaluasi kebijakan secara berkala agar kebijakan tetap adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan dan tetap relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Meskipun regulasi telah disusun untuk menciptakan ketertiban ruang publik, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan kebijakan dan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini menegaskan perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan PKL, memperbaiki konsistensi pelaksanaan oleh organisasi terkait, serta memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat dalam penerapan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun masih menghadapi sejumlah tantangan. Kebijakan ini telah dijalankan dengan organisasi yang cukup responsif serta memperoleh dukungan penuh dari pemerintah daerah. Meski demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya tingkat pemahaman PKL terhadap regulasi yang berlaku, kendala teknis dalam proses penegakan hukum, serta kerumitan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor terkait.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus di kawasan Alun-Alun Gresik, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kegiatan sosialisasi serta memberikan pelatihan intensif kepada PKL, khususnya dalam hal pemahaman regulasi dan mekanisme penataan. Selain itu, dibutuhkan penguatan sarana pendukung, seperti sistem penegakan hukum yang konsisten dan penyediaan fasilitas memadai bagi PKL, guna memperlancar implementasi kebijakan tersebut.

Partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pemberi masukan yang konstruktif berdasarkan pengalaman mereka berinteraksi dengan PKL. Untuk penelitian ke depan, disarankan agar fokus diarahkan pada penilaian dampak jangka panjang dari penerapan kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan tingkat kepuasan masyarakat. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Y., Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., ... & Putra, M. F. P. (2024). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan penerapannya*. Penerbit Tahta Media.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Gresik 2021*. Gresik: BPS Gresik.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Rahmawati, D. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 123-135.
- Sari, R., & Prasetyo, A. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 45-60.
- Sinambela, S. (2008). *Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Kota*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Smith, T. B. (2011). Policy Implementation Theory: A Framework for Analysis. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.